

**PEMERINTAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2020**

*Tim Penyusun Rencana Kerja*

2020



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 65 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2020

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor xx Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor xx Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah melalui tahap Penyusunan Rancangan Perubahan Renja, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Penetapan Perubahan Renja Sekretariat Daerah tahun 2020.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020. Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 dan mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 khususnya rencana pada tahun pertama.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 disusun sebagai bahan penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2020 dan menjadi acuan penyusunan Perubahan RKA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yaitu "meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten klungkung".

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 TAHUN 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
- 10) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020;
- 11) Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang peribahan atas Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung;
- 12) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018- 2023;

- 13) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35).
- 14) Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung pada Tahun 2020.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 adalah :

- a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung selama tahun 2020.
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara ringkas yang mencakup, antara lain :

- 1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, proses penyusunan Perubahan Renja, Keterkaitan antara Perubahan Renja dengan Perubahan RKPD, Renstra Badan Perencanaan, Penelitian serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.
- 1.2 Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- 1.3 Maksud dan Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja.
- 1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2019**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan II  
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah sampai Triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD  
Menguraikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang menguraikan isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah saat ini.

### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional menguraikan Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV PENUTUP

Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung s.d. Triwulan II tahun 2020 adalah sebagaimana tersaji dalam table 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2020  
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu ( )		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																						
	4	1			Administrasi Pemerintahan																						
	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	18,00 Jumlah	271.979.464,00	89,87 Jumlah	256.144.106,00	0,00 Jumlah	0	0,00 Jumlah	0	0,00 Jumlah	0	0,00 Jumlah	0	0	0	0	89,87	256.144.106,00	499,28	94,18	Bagian Kesra	

4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	215.991.564,00	81,78%	204.284.442,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	81,78	204.284.442,00	81,78	94,58	Sub Bagian Keperencanaan dan Olah Raga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pariwisata
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian Disiplin Aparatur	95,00%	22.867.000,00	65,40%	21.070.332,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	65,4	21.070.332,00	68,84	92,14	Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	16,00 Dokumen	20.210.000,00	7,00 Dokumen	23.419.732,00	0,00 Dokumen	0	0	0	7	23.419.732,00	43,75	115,88	Sub Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						

4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	46,00 Laporan	4.092.000,00	18,00 Laporan	2.625.000,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0	0	18	2.625.000,00	39,13	64,15	Sub Bagian, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Trans migrasi
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	24,00 Laporan	8.818.900,00	12,00 Laporan	4.744.600,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0	0	12	4.744.600,00	50	53,8	Sub Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Trans migrasi
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)</b>																		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>56,7</b>	<b>84,11</b>	
<b>Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>T</b>	
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16,00 Jumlah	303.055.900,00	0,00 Jumlah	182.268.628,00	0,00 Jumlah	0	0,00 Jumlah	0	0,00 Jumlah	0	0,00 Jumlah	0	0	0	0	182.268.628,00	0	60,14	Bagian Hukum dan HAM
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00 Persen	291.420.600,00	63,63 Persen	172.383.128,00	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0	0	63,63	172.383.128,00	63,63	59,15	Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

	4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubag Peraturan Perundang-undangan
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Tersedianya Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD (Dokumen)	18,00 Dokumen	5.248.000,00	7,00 Dokumen	3.786.000,00	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0	0	7	3.786.000,00	38,89	72,14	Kasubag Bantuan Hukum HAM	
	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	138,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM
	4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (laporan)	24,00 Laporan	6.387.300,00	9,00 Laporan	6.099.500,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0	0	9	6.099.500,00	37,5	95,49	Kasubag bantuan hukum dan HAM	
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>35,01</b>	<b>56,7</b>			
<b>Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			
	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks reformasi birokrasi perangkat	16,00 jumlah	150.097.400,00	0,00 jumlah	156.165.896,00	0,00 jumlah	0	0,00 jumlah	0	0,00 jumlah	0	0	0	0	156.165.896,00	0	104,04	Bagian Perekonomian	

					(RENSTRA )	t daerah	ah																n		
	4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA )	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	136.531.000,00	95,00 persen	143.114.596,00	0,00 persen	0	0	0	95	143.114.596,00	95	104,82	Ni Wayan Martiani, SH						
	4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA )	Capaian disiplin aparatur	90,00 persen	1.098.000,00	90,00 persen	1.408.000,00	0,00 persen	0	0	0	90	1.408.000,00	100	128,23	Ni Wayan Martiani, SH						
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA )	Dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD	18,00 dokumen	2.963.000,00	8,00 dokumen	2.945.000,00	0,00 dokumen	0	0	0	8	2.945.000,00	44,44	99,39	Ni Wayan Martiani, SH						
	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA )	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	46,00 laporan	910.000,00	23,00 laporan	1.347.000,00	0,00 laporan	0	0	0	23	1.347.000,00	50	148,02	Ni Wayan Martiani, SH						

4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	12,00 laporan	8.595.400,00	12,00 laporan	7.351.300,00	0,00 laporan	0	0	0	12	7.351.300,00	100	85,53	Ni Wayan Martiani, SH								
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>77,89</b>	<b>113,2</b>		
<b>Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>T</b>	<b>ST</b>		
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16,00 Nilai	220.624.000,00	0,00 Nilai	134.723.732,00	0,00 Nilai	0	0	0	0	134.723.732,00	0	61,06	Kepala Bagian Pemerintahan								
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 persen	165.124.000,00	100,00 persen	125.757.732,00	0,00 persen	0	0	0	100	125.757.732,00	100	76,16	Kasubag								
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian Disiplin Aparatur	100,00 persen	3.600.000,00	100,00 persen	870.000,00	0,00 persen	0	0	0	100	870.000,00	100	24,17	Kasubag								
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan	Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat	8,00 dokumen	5.400.000,00	8,00 dokumen	1.422.000,00	0,00 dokumen	0	0	0	8	1.422.000,00	100	26,33	Kasubag								



					at daerah																		m		
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen perencanaan dan Penganggaran	4,00 dokumen	8.559.000,00	8,00 dokumen	6.842.000,00	0,00 dokumen	0	0	0	8	6.842.000,00	200	79,94	Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian Program						
	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan Kinerja terkirim tepat Waktu	12,00 laporan	6.864.000,00	12,00 laporan	3.114.000,00	0,00 laporan	0	0	0	12	3.114.000,00	100	45,37	Kasubbag perencanaan dan pengendalian Program						
	4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	12,00 laporan	184.968.000,00	12,00 laporan	119.568.600,00	0,00 laporan	0	0	0	12	119.568.600,00	100	64,64	Kasubbag perencanaan dan Pengendalian program						
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)</b>																		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>120</b>	<b>71,55</b>		
<b>Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>S</b>		

	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21,00 point	632.329.900,00	17,31 point	434.553.933,00	0,00 point	0	0,00 point	0	0,00 point	0	0	0	17,31	434.553.933,00	82,43	68,72	Bagian Humas dan Protokol		
	4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	90,00 Persen	611.094.000,00	90,00 Persen	416.120.508,00	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0	0	90	416.120.508,00	100	68,09	Bagian Humas dan Protokol		
	4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian Disiplin Aparatur	50,38 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Humas dan Protokol	
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD tersedia tepat waktu	8,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Humas dan Protokol	
	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Humas dan Protokol	

4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12,00 Laporan	21.235.900,00	12,00 Laporan	18.433.425,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0	0	12	18.433.425,00	100	86,8	Bagian Humas dan Protokol	
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)</b>																		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>40</b>	<b>30,98</b>		
<b>Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	indek reformasi birokrasi perangkat daerah	16,00 point	20.932.983.420,64	0,00 point	1.017.750.126,00	13,00 point	4.348.853.266,64	12,05 point	589.376.704,00	0,00 point	933.395.771,00	12,05 point	1.522.772.475,00	92,69	35,02	12,05	2.540.522.601,00	75,31	12,14	Kepala Bagian Umum Setda Kab.Klungkung	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 persen	17.437.684.632,00	100,00 persen	397.642.398,00	100,00 persen	3.681.730.094,00	91,33 persen	484.769.838,00	4,69 persen	779.324.322,00	96,02 persen	1.264.094.160,00	96,02	34,33	96,02	1.661.736.558,00	96,02	9,53	Kasubag. Tata Usaha	
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian Disiplin Aparatur	0,00 Persen	2.896.270.888,64	0,00 Persen	348.434.866,00	80,00 Persen	537.704.122,64	56,58 Persen	90.118.216,00	-7,23 Persen	128.285.699,00	49,35 Persen	218.403.915,00	61,69	40,62	49,35	771.675.993,00	52,63	26,64		
					Persentase Capaian Disiplin Aparatur Setahun	95,00 Persen		100,00 Persen		0,00 Persen	0,00 Persen		0,00 Persen		0,00 Persen				100						

4	1	9	3	Pengelolaan Kearsipan (RENSTRA)	Cakupan Surat-surat terdistribusi sesuai SOP	100,00 persen	129.122.500,00	9,00 persen	20.412.000,00	100,00 persen	21.094.500,00	40,30 persen	4.986.000,00	25,58 persen	5.610.000,00	65,88 persen	10.596.000,00	65,88	50,23	65,88	31.008.000,00	65,88	24,01	Kasubag.Tata Usaha	
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD tersedia tepat waktu	8,00 dokumen	103.777.000,00	8,00 dokumen	3.679.400,00	8,00 dokumen	26.673.150,00	3,00 dokumen	4.196.400,00	3,00 dokumen	518.750,00	6,00 dokumen	4.715.150,00	75	17,68	6	8.394.550,00	75	8,09	Kasubag.Adm Keuangan dan Aset	
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	12,00 laporan	39.083.500,00	12,00 laporan	2.113.750,00	23,00 laporan	10.804.500,00	4,00 laporan	0	3,00 laporan	2.588.500,00	7,00 laporan	2.588.500,00	30,43	23,96	7	4.702.250,00	58,33	12,03	Kasubag.Adm Keuangan dan Aset	
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan keuangan Terkirim Tepat Waktu	12,00 laporan	327.044.900,00	12,00 laporan	40.630.500,00	12,00 laporan	70.846.900,00	3,00 laporan	5.306.250,00	3,00 laporan	17.068.500,00	6,00 laporan	22.374.750,00	50	31,58	6	63.005.250,00	50	19,27	Kasubag.Adm Keuangan dan Aset	
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)</b>																		<b>63,17</b>	<b>33,07</b>			<b>66,31</b>	<b>16,6</b>		
<b>Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan</b>																		<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>		
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat	20,00 Point	1.525.320.575,00	8,00 Point	223.660.473,00	0,00 Point	0	0,00 Point	0	0,00 Point	0	0,00 Point	0	0	8	223.660.473,00	40	14,66	Bagian Adm PBJ		

					)	t Daerah																				
	4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95,00 persen	1.481.607.575,00	95,00 persen	184.891.223,00	0,00 persen	0	0	0	0	95	184.891.223,00	100	12,48	Kepala Bag. Adm. PBJ						
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen perencanaan dan perencanaan tepat waktu	8,00 dokumen	5.187.500,00	8,00 dokumen	4.151.750,00	0,00 dokumen	0	0	0	0	8	4.151.750,00	100	80,03							
	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	20,00 Laporan	4.332.500,00	20,00 Laporan	3.982.500,00	0,00 Laporan	0	0	0	0	20	3.982.500,00	100	91,92	Bagian Adm PBJ						
	4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	12,00 Laporan	34.193.000,00	12,00 Laporan	30.635.000,00	0,00 Laporan	0	0	0	0	12	30.635.000,00	100	89,59	Bagian Adm PBJ						
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)</b>																				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>100</b>	<b>68,51</b>	

Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR			ST	S		
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	19,00 Nilai	387.596.768,00	19,53 Nilai	197.460.090,00	0,00 Nilai	0	0,00 Nilai	0	0,00 Nilai	0	0	0	19,53	197.460.090,00	102,79	50,94	Bagian Organisasi		
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	90,00 Persen	118.366.516,00	95,00 Persen	103.307.255,00	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0	0	95	103.307.255,00	105,56	87,28	Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian Disiplin Aparatur	90,00 Persen	26.455.852,00	74,16 Persen	5.252.100,00	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0	0	74,16	5.252.100,00	82,4	19,85	Sub Bagian Kelembagaan		
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	18,00 Dokumen	7.858.000,00	9,00 Dokumen	22.825.360,00	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0	0	9	22.825.360,00	50	290,47	Sub Bagian Pengembangan Kinerja		
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23,00 Dokumen	117.458.200,00	23,00 Dokumen	57.383.900,00	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0	0	23	57.383.900,00	100	48,85	Sub Bagian Pengembangan Kinerja		



Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	0	0			140	55,97					
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR			ST	R					
	4	1	1	6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (RENSTRA)	Tingkat Kepuasan atas Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	100,00 Persen	26.297.173.889,00	0,00 Persen	4.525.214.804,00	100,00 Persen	4.337.523.789,00	100,00 Persen	405.530.474,00	0,00 Persen	506.230.012,00	100,00 Persen	911.760.486,00	100	21,02	100	5.436.975.290,00	100	20,68	Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab. Klungkung		
	4	1	1	6	2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri (RENSTRA)	Cakupan Layanan Keprotokolan Sesuai SOP	100,00 Persen	5.804.038.289,00	100,00 Persen	1.070.814.960,00	100,00 Persen	760.296.789,00	100,00 Persen	187.454.658,00	0,00 Persen	37.648.252,00	100,00 Persen	225.102.910,00	100	29,61	100	1.295.917.870,00	100	22,33	Bagian Humas dan Protokol	
	4	1	1	6	0	Dialog Interaktif (RENSTRA)	Cakupan Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Didokum	100,00 persen	4.159.723.600,00	0,00 persen	564.685.500,00	100,00 persen	697.055.400,00	100,00 persen	66.092.000,00	0,00 persen	83.760.917,00	100,00 persen	149.852.917,00	100	21,5	100	714.538.417,00	100	17,18	Bagian Humas dan Protokol	













4	1	3	1	Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan (RENSTRA)	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	36,00	757.172.586,76	5,00	24.965.242,00	6,00	93.788.586,72	2,00	525.000,00	0,00	0	2,00	525.000,00	33,33	0,56	2	25.490.242,00	5,56	3,37	Kasubag	
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)</b>																		<b>9,79</b>	<b>7,88</b>			<b>7,53</b>	<b>10,97</b>		
<b>Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
4	1	4	6	Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA)	Unit Kerja Yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik	10,00	310.269.000,00	0,00	215.927.075,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	215.927.075,00	0	69,59	Bagian Organisasi	
4	1	4	6	1	Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA)	Perbup Nilai Jabatan Tersedia Tepat Waktu	1,00	147.265.500,00	0,00	120.335.900,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	120.335.900,00	0	81,71	Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
					Revisi Perbup Uraian Tugas Tersedia Tepat Waktu	1,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0					
4	1	4	6	2	Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA)	Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetis	8,00	163.003.500,00	0,00	95.591.175,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	95.591.175,00	0	58,64	Sub Bagian Tata Laksan	





4	1	4	8	Monitorin g dan Evaluasi Bidang Perijinan, Investasi dan Penyertaa n Modal (RENSTRA )	Jumlah kebijakan bidang perijinan, investasi dan penyerta an modal	6,00 kebij akan	571.877.20 0,00	0,00 kebij akan	0	5,00 kebij akan	140.736. 800,00	0,00 kebij akan	2.876.000,0 0	3,00 kebij akan	317.500,00	3,00 kebijak an	3.193.5 00,00	60	2,27	3	3.193.500,00	50	0,56	Kasub. Bag. Pereko nomia n	
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)</b>																		<b>102</b>	<b>6,85</b>			<b>31,19</b>	<b>18,5 2</b>		
<b>Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan</b>																		<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
4	1	5	6	Program Penataan Pengadaa n Baran g/Jasa Pemerinta h (RENSTRA )	% Harga satu an yang digunaka n dalam Dokumen perencana an	100, 00 pers en	63.655.550, 00	100, 00 pers en	55.943.750,0 0	0,00 pers en	0	0,00 pers en	0	0,00 pers en	0	0,00 persen	0	0	0	100	55.943.750,0 0	100	87,8 9	Kepala bagian ADM pempa nguna n	
4	1	5	2	Penyusun an Standar Satuan Harga Baran g (RENSTRA )	Tersedia nya buku satu an standar harga untuk perencana an	50,0 0 buku	63.655.550, 00	50,0 0 buku	55.943.750,0 0	0,00 buku	0	0,00 buku	0	0,00 buku	0	0,00 buku	0	0	0	50	55.943.750,0 0	100	87,8 9	Kusub bag perenc anaan dan penge ndalian Progra m	
4	1	5	5	Pemantau an Pelaksa naan Kebijaka n Pempa ngunan	Laporan Teppra tersedia tepat waktu	100, 00 pers en	0	0,00 pers en	0	0,00 pers en	0	0,00 pers en	0	0,00 pers en	0	0,00 persen	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Admini strasi Pempa nguna n





	4	1	5	1	Perencanaan~ Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RENSTRA)	Dokumen SAKIP Kabupaten Klungkung Tersedia Tepat Waktu	1,00 Gabung	2.825.737.3 10,00	0,00 Gabung	50.097.500,0 0	1,00 Gabung	899.984. 264,00	0,00 Gabung	45.138.600, 00	0,00 Gabung	4.652.000,0 0	0,00 Gabung	49.790. 600,00	0	5,53	0	99.888.100,0 0	10	3,53	Sub Bagian Penge mbang an Kinerja
						Laporan Reformas i Birokrasi Terakhir Tepat Waktu	5,00 Dokumen		1,00 Dokumen		1,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen			1					
	4	1	5	2	Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Perangkat Daerah (RENSTRA)	Perbup Kelas Jabatan Tersedia Tepat Waktu	1,00 Dokumen	787.907.20 0,00	0,00 Dokumen	0	1,00 Dokumen	238.751. 800,00	1,00 Dokumen	4.075.000,0 0	0,00 Dokumen	15.520.200, 00	1,00 Dokumen	19.595. 200,00	100	8,21	1	19.595.200,0 0	100	2,49	
						Perbup Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu	1,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		1,00 Dokumen		1,00 Dokumen			1					

4	1	5	3	Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA )	Inovasi Pelayana n Publik Terkirim Tepat Waktu ke Kompetis i Inovasi Pelayana n Publik	36,0 0 Aksi	807.890.00 0,00	0,00 Aksi	0	8,00 Aksi	219.185. 000,00	0,00 Aksi	2.179.000,0 0	8,00 Aksi	1.139.950,0 0	8,00 Aksi	3.318.9 50,00	50	1,51	8	3.318.950,00	11,11	0,41	Kepala Sub Bagian Tata Laksan a	
					SK Kepala Daerah tentang SOP Tersedia Tepat Waktu	1,00 Doku men		0,00 Doku men		1,00 Doku men		0,00 Doku men		0,00 Doku men		0,00 Dokum en			0						
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)</b>																		<b>50</b>	<b>5,08</b>			<b>40,37</b>	<b>2,14</b>		
<b>Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
4	1	5	9	Program Peningkat an Kinerja Perangkat Daerah (RENSTRA )	Skor kompone n Pelapora n pada LHE AKIP Kabupate n	12,0 0 Nilai	481.586.40 0,00	0,00 Nilai	435.726.217, 00	0,00 Nilai	0	0,00 Nilai	0	0,00 Nilai	0	0,00 Nilai	0	0	0	0	435.726.217, 00	0	90,4 8	Bagian Organi sasi	
4	1	5	1	Perencana an Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA )	Perjanjia n Kinerja Tersedia Tepat Waktu	2,00 Doku men	227.208.20 0,00	2,00 Doku men	58.679.100,0 0	0,00 Doku men	0	0,00 Doku men	0	0,00 Doku men	0	0,00 Dokum en	0	0	0	2	58.679.100,0 0	100	25,8 3	Sub Bagian Penge mbang an Kinerja	
4	1	5	2	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi	Laporan Kinerja Instansi Pemerint ah Kab.	1,00 Doku men	254.378.20 0,00	1,00 Doku men	377.047.117, 00	0,00 Doku men	0	0,00 Doku men	0	0,00 Doku men	0	0,00 Dokum en	0	0	0	1	377.047.117, 00	100	148, 22	Sub Bagian Penge mbang an	



4	1	6	2	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata (RENSTRA)	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata Yang Ditetapkan	6,00 Kebijakan	328.551.028,00	1,00 Kebijakan	16.049.300,00	1,00 Kebijakan	71.584.132,00	1,00 Kebijakan	7.189.000,00	0,00 Kebijakan	0	1,00 Kebijakan	7.189.000,00	100	10,04	1	23.238.300,00	16,67	7,07	Sub Bagian Keperencanaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pariwisata
4	1	6	3	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (RENSTRA)	Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Ditetapkan	11,00 Kebijakan	319.806.508,00	1,00 Kebijakan	17.460.700,00	2,00 Kebijakan	67.259.652,00	1,00 Kebijakan	5.486.042,00	1,00 Kebijakan	5.055.813,00	2,00 Kebijakan	10.541.855,00	100	15,67	2	28.002.555,00	18,18	8,76	Sub Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)</b>																	<b>100</b>	<b>15,68</b>			<b>17,17</b>	<b>11,71</b>		
<b>Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan</b>																	<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		

	4	1	8	0	Program Pengembangan Program Pembangunan Daerah (RENSTRA)	Jumlah Paket Pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat	100,00 persen	5.284.275.624,00	0,00 persen	0	0,00 persen	898.060.317,00	0,00 persen	34.075.144,00	0,00 persen	42.550.691,00	0,00 persen	76.625.835,00	24,99	8,53	0	76.625.835,00	0	1,45	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
						Jumlah Paket Pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat	0,00 persen		0,00 persen		100,00 persen		0,00 persen		24,99 persen		24,99 persen				24,99				
	4	1	8	1	Penyusunan Program Pembangunan Daerah (RENSTRA)	Cakupan Program Pembangunan Daerah	100,00 persen	1.665.988.494,00	0,00 persen	0	100,00 persen	262.113.947,00	8,33 persen	2.970.000,00	24,99 persen	7.160.000,00	33,32 persen	10.130.000,00	33,32	3,86	33,32	10.130.000,00	33,32	0,61	Kasubag Penyusunan Program
	4	1	8	2	Pengendalian Program Pembangunan Daerah (RENSTRA)	Laporan Hasil Pengendalian	100,00 persen	1.980.573.000,00	0,00 persen	0	100,00 persen	315.490.250,00	25,00 persen	3.084.350,00	25,00 persen	0	50,00 persen	3.084.350,00	50	0,98	50	3.084.350,00	50	0,16	Subbag Pengendalian Program

4	1	8	3	Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah (RENSTRA)	Laporan Hasil Evaluasi	100,00 persen	1.637.714.130,00	0,00 persen	0	100,00 persen	320.456.120,00	18,18 persen	28.020.794,00	27,27 persen	35.390.691,00	45,45 persen	63.411.485,00	45,45	19,79	45,45	63.411.485,00	45,45	3,87	Subag Evaluasi dan Pelaporan
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)</b>																	<b>42,92</b>	<b>8,21</b>			<b>42,92</b>	<b>1,55</b>		
<b>Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI Sekretariat Daerah</b>							<b>131.756.917.178,90</b>		<b>20.683.923.349,00</b>		<b>22.990.935.802,12</b>		<b>3.096.357.561,00</b>		<b>2.462.121.345,00</b>		<b>5.558.478.906,00</b>				<b>27.524.627.068,00</b>			
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)</b>																	<b>49,69</b>	<b>18,94</b>			<b>69,03</b>	<b>47,38</b>		
<b>Predikat Kinerja Dari Seluruh Program</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>		

Dari sebanyak 10 program dan 47 kegiatan yang terdapat pada Renstra Sekretariat Daerah periode 2013-2018, terdapat 5 program (35%) dan 32 kegiatan dibawah (45%) yang belum mencapai target kinerja yang direncanakan. Terdapat 2 program (100%) yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebanyak 4 program (57,14%) yang capaian kinerjanya melebihi target yang direncanakan. Sedangkan 5 Program yang belum memenuhi target kinerja adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Program-Program Yang Belum Memenuhi Target Kinerja Yang Direncanakan

Kode	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi tepat waktu	100 Persen	49,98	49,98
4.1.23	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan	100 Persen	0,4	0,4
4.1.46	Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Unit Kerja yang menerapkan standar Pelayanan Publik	10 Nilai	0	0
4.1.58	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Capaian Target Tahapan Reformasi Birokrasi	90 Persen	0	0
4.3.33	Program pengembangan Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pembangunan Daerah yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat	100 Persen	24,99	0
		Jumlah Paket Pembangunan Daerah yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat	0 Persen		

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renja Tahun 2020 dan capaian Renstra 2013-2018 hingga triwulan II 2020 maka dibutuhkan adanya perubahan strategi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penyesuaian terhadap perubahan kebijakan terkait kondisi keuangan daerah serta dalam rangka mengoptimalkan dukungan terhadap capaian visi dan misi kepala daerah.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat dilihat capaian kinerja sasaran SKPD yang sekaligus telah ditetapkan sebagai IKU Sekretariat Daerah, yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Klungkung. Telah ditetapkan tiga sasaran dengan empat indikator kinerja yang sekaligus merupakan IKU Perangkat Daerah. Sasaran pertama yaitu Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra dengan indikator yaitu Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan

Kesra. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan sasaran yang ketiga Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung dengan 2 indikator yaitu Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dan Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi pelayanan Nasional tersedianya.

Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra pada tahun 2019 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung,2020

Gambar 3.1. Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra,2019-Akhir RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Kinerja pertama dari Sekretariat Daerah adalah Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra di Kabupaten Klungkung diukur dengan Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra. Pada tahun 2019, Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra dengan target sebesar 95 persen telah terealisasi sebesar 96,14 persen atau capaian sebesar 101,20 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2019 telah tercapai 101,20 persen. Tahun 2019 merupakan tahun pertama periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 yang menyesuaikan dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung.Untuk itu capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2019 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.2. Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, 2019-Akhir Periode RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 dengan target 95 persen terealisasi sebesar 111,05 persen atau tercapai 116,89 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2019 telah tercapai sebesar 116,89 persen. Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung periode 2018-2023.

Sedangkan capaian indikator sasaran yang kedua yaitu Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional adalah sebagai berikut :



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.5. Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional, 2019-2023 Akhir Periode RPJMD

Pada tahun 2019, aksi pelayanan public yang masuk nominasi penghargaan nasional adalah sebanyak 1 aksi pelayanan public, sehingga capaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik tercapai sebesar 100%. Adapun aksi pelayanan public yang masuk nominasi penghargaan nasional adalah : KRISS (Kring Sehat). Aksi ini masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2019 ditunjukkan pada grafik berikut ini



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.3. Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin) , 2019-2023 (Akhir Periode RPJMD)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin) pada tahun 2019 belum memenuhi target yang ditetapkan, dimana target ditetapkan sebesar 82 poin dan terealisasi sebesar 78,38 poin atau tercapai 95,59 persen. Hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah sangat menentukan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP di tingkat Kabupaten. Jika hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah tidak memuaskan maka Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP di tingkat Kabupaten juga akan terpotret tidak memuaskan. Berikut ini disajikan hasil evaluasi SAKIP terhadap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Klungkung.

Untuk tingkat capaian indikator kinerja nilai AKIP Komponen Perencanaan dalam tiga tahun terakhir terus membaik dengan capaian kinerja semakin meningkat meski capaiannya masih terus dibawah target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2019, untuk komponen perencanaan pada implementasi perencanaan strategis, kualitas dan

implementasi perencanaan tahunan. Pada implementasi RPJMD/Renstra kelemahan terjadi pada:

- a. Penyusunan RKP/Regja yang belum mengacu pada dokumen RPJMD/Renstra,
- b. Target jangka menengah dalam RPJMD/Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
- c. Dokumen RPJMD/Renstra belum direviu secara berkala.

Sedangkan pada kualitas perencanaan kinerja tahunan kelemahan yang terjadi yaitu pada :

- a. Penetapan target kinerja.
- b. Kegiatan yang direncanakan belum menggambarkan upaya pencapaian sasaran.
- c. Kegiatan yang mencapai sasaran belum menjadi prioritas/didukung oleh anggaran yang memadai.
- d. Dokumen PK yang belum selaras dengan RPJMD/Renstra dan belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- e. Pada tingkat perangkat daerah, rencana aksi atas kinerja belum mencantumkan target secara periodik atas kinerja.

Kelemahan pada implementasi perencanaan kinerja tahunan adalah sebagai berikut :

- a. RKP/Regja belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- b. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.
- c. Pada tingkat PD, pencapaian rencana aksi atas kinerja belum dimonitor secara berkala.
- d. Rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
- e. Perjanjian kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

Selanjutnya pencapaian kinerja program kegiatan Kabupaten Klungkung disajikan pada table 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3  
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, 2020

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Pelaksana
Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Program Pengembangan Otonomi Daerah	789.163.854	152.158.552	637.005.302	19,28	Pemerintahan
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.411.639.645	0	1.411.639.645	0	Hukum dan Ham
	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.531.147.588,76	909.600.252	2.621.547.337,76	25,76	Kesra

<b>Jumlah</b>		<b>5.731.951.087,76</b>	<b>1.061.758.804</b>	<b>4.700.192.284,76</b>	<b>45,04</b>	
Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	569.128.464	75.714.252	493.414.212	13,30	Perekonomian
	Program Pengembangan Pembangunan Daerah	608.127.724	88.422.732	519.704.992	14,54	Adm.Pembangunan
	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	629.020.396	182.652.905	446.367.491	29,04	PBJ
<b>Jumlah</b>		<b>1.806.276.584</b>	<b>346.789.889</b>	<b>1.459.486.695</b>	<b>56,88</b>	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4.619.964.400	1.187.164.238	3.432.800.162	26,06	Humas Protokol
	Program Pelayanan Kesekretariatan	5.551.853.806,44	1.766.355.907	3.785.497.899,14	31,82	Umum
	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	926.197.564	0	926.197.564	0	Organisasi
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	5.720.917.187	1.890.381.443	3.830.535.633	34,34	Umum
<b>Jumlah</b>		<b>11.098.015.770,44</b>	<b>2.953.520.145</b>	<b>8.144.495.625</b>	<b>92,22</b>	
<b>Grand Total</b>		<b>24.357.160.629,92</b>	<b>6.252.450.392</b>	<b>18.104.710.237,92</b>	<b>30,74</b>	

Sumber : Sirebangda, 2020

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, Sekretariat Daerah memiliki peran sentral dalam

mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memiliki fokus sasaran yang jelas dan terukur. Sedangkan dalam menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan, maka Sekretariat Daerah diharapkan mampu menyediakan rekomendasi kebijakan prioritas daerah yang harus dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam empat tahun pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018 mengalami kendala dan permasalahan yang menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan pada penyediaan data informasi perencanaan yaitu :
  - a) Perangkat daerah belum memiliki mekanisme pengumpulan data terkait tugas dan fungsinya secara baku, sehingga ketersediaan data informasi masih belum optimal.
  - b) Belum terbangunnya system informasi pengelolaan data perencanaan secara baik sehingga ketersediaan data informasi sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah belum optimal.
2. Permasalahan pada proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu :
  - a) Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan. Dalam tiga tahun pelaksanaan Renstra, masih terdapat keterlambatan pelaksanaan tahapan kegiatan. Keterlambatan ini juga telah menjadi temuan dari instansi pengawasan.
  - b) Penyusunan renja perangkat daerah yang belum sesuai dengan ketentuan. Penyusunan perencanaan masih dianggap sebagai dokumen prasyarat yang sekedar ada sehingga penyelesaiannya dominan hanya pada Sekretariat (subbag perencanaan) bukan hasil dari diskursus seluruh pihak yang terkait (bidang-bidang). Akibatnya kualitas penetapan permasalahan/isu strategis, strategi, target kinerja dan program kegiatan prioritas belum jelas.
  - c) Kualitas indikator kinerja masih banyak belum memenuhi kriteria SMART. Kondisi diakibatkan belum dipahaminya kinerja dan penyusunan indikator kinerja sehingga hasilnya indikator kinerja yang dipasang belum menggambarkan kinerja yang dicapai dari kegiatan/program yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya. Perumusan sasaran program kegiatan belum fokus dan jelas sehingga menyulitkan dalam perumusan indikator kerjanya.
  - d) Perencanaan belum disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kejelasan lokasi, status tanah dan perencanaan detilnya sehingga banyak kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan gagal.
  - e) Lemahnya perumusan prioritas daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah selama ini belum mampu merumuskan prioritas daerah secara jelas dan terukur melalui pendekatan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial.
3. Permasalahan pada pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :
  - a) Pengendalian rencana pembangunan daerah belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kondisi ini akibat dari masih terjadinya inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen penganggaran.

- b) Pelaksanaan program kegiatan belum didasarkan pada tahapan dan jadwal kegiatan yang jelas sehingga masih terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
4. Permasalahan pada evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :
    - a) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak tersusun dengan baik karena banyak kegiatan yang tidak terukur sebagai dampak belum konsistennya indikator kinerja.
    - b) Evaluasi baru pada tahap pengukuran kinerja belum mampu menyediakan rekomendasi perbaikan karena minimnya penyajian data dan identifikasi permasalahan.
  5. Permasalahan pada pelaksanaan penelitian dan pengembangan diantaranya adalah :
    - a) Kegiatan penelitian dan pengembangan selama periode 2013-2018 belum optimal karena belum ditetapkannya Rencana Induk Kelitbangan dan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA). Litbang yang dikembangkan selama ini, lebih banyak menunggu arahan pimpinan, kurang berdasarkan upaya pencarian solusi mengatasi permasalahan pembangunan.
    - b) Hasil kelitbangan belum didiseminasikan secara optimal sehingga menjadi masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Permasalahan-permasalahan di atas, berdampak pada belum optimalnya capaian kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Beberapa kegiatan prioritas yang dirancang mengalami kegagalan karena lemahnya perencanaan seperti masalah kesiapan lahan, dokumen perencanaan dan terdapat sub pekerjaan yang tidak direncanakan sehingga outcome yang diharapkan tidak terwujud.

Selain permasalahan tersebut, juga perlu diidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah khususnya sesuai tugas dan fungsinya. Tantangan perencanaan ke depan diantaranya adalah:

- a. meningkatnya tuntutan akan penyelenggaraan pembangunan yang efektif, tepat sasaran dan tuntas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan belum optimal disamping belum terimplementasinya pendekatan perencanaan substantif (tematik-holistik, integrative dan spasial). Perubahan mindset stakeholder perencanaan yang selama ini menyusun perencanaan lebih bersifat kegiatan rutinitas setiap tahun menjadi berbasis target kinerja yang jelas masih perlu upaya yang kuat dan berkelanjutan.
- b. Menguatnya tuntutan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang selama ini cenderung diabaikan. Kedepan tidak boleh lagi ada kegiatan yang tidak direncanakan tetapi dianggarkan. Hal ini adalah salah satu aksi prioritas dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Korupsi Terintegrasi.

Sedangkan peluang yang dapat mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan diantaranya adalah :

- a. Kuatnya political will pimpinan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah baik melalui implementasi SAKIP dan roadmap Reformasi Birokrasi;

- b. Penyelenggaraan Rencana Aksi Program Penanggulangan Korupsi Terintegrasi yang merupakan bagian kegiatan koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi yang didorong oleh KPK.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan dan peluang maka dapat dirumuskan isu strategis perencanaan sebagai berikut:

- a. Sistem pengelolaan data yang belum optimal
- b. Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal;
- c. Kualitas pengendalian dan evaluasi yang belum optimal;
- d. kualitas SDM perencanaan yang belum optimal, baik di internal Sekretariat Daerah maupun pada stakeholder (pelaku fungsi perencanaan di SKPD); dan
- e. Kelitbangan belum optimal mendorong inovasi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran**

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 menyelenggarakan dua bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu

“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA” serta mendukung misi mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan good corporate governance, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menyusun rencana kerja SKPD. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal. Untuk itu Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan : meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
- b. Sasaran :
  - 1) Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra
  - 2) Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan
  - 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Klungkung
  - 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung**  
**Tahun 2020**

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020	Program Pendukung
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	90	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Bag. Hukum dan HAM), Program Program Pengembangan Otonomi Daerah (Bag. Pemerintahan), Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bag. Pemerintahan), Program Pengembanagan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bag. Kesra)
	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90	Program Penyiapan data/Informasi Perkembangan Perekonomian daerah (Bag. Perekonomian) Program Peningkatan pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala daerah (Bag. Adm Pembangunan) Program penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bag. APBJ)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	88	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	1	Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum), Program Pelayanan Kesekretariatan Dan Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum)

Sasaran dan indikator sasaran telah ditetapkan sebagai target **Indikator Kinerja Utama** SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dan merupakan cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan fungsi penunjang di bidang penelitian dan pengembangan.

### **3.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah. Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)
  - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penilaian kinerja dan optimalisasipenerapantunjangankinerjaberbasisaplikasi e-kinerja.
  - b. Menggunakan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik
  - c. Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar-besarnya untuk pelayanan publik
  - d. Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta
  - e. Mendorongpraktik-praktikreformasibirokrasimelalui transparansi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan maupun kinerja melalui kebijakan pemerintah daerah yang terkait
2. Strategi Kelemahan-Peluang (W-O)
  - a. Reformasi manajemen kinerja aparatur daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan instansi lain

- b. Reformasi manajemen pemerintahan daerah melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern yang lebih baik, mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi kebijakan, transparansi pengadaan barang jasa dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam manajemen pemerintahan
3. Strategi Kekuatan – Ancaman (S-T)
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian budaya dan kesadaran hukum dimulai dari aparaturnya daerah
  - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui teknologi informasi
4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T)
- a. Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern untuk meningkatkan sumber daya aparaturnya
  - b. Upaya peningkatan partisipasi sektor perbankan dalam memberikan dukungan kepada lembaga keuangan mikro
  - c. Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam menilai kinerja aparaturnya daerah.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung periode 2018-2023 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung  
Periode 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>Visi :TerwujudnyaKlungkung yang Unggul dan Sejahtera</b>				
<b>Misi 4: Terwujudnyapemerintahan yang responsiftransparan, santun dan inovatifdgnmenjagakepastianhukum dan stabilitaspolitik</b>				
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	1. Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	1.1. Mendorong Kecamatan untuk meningkatkan tertib administrasi kecamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1.1. Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi, Evaluasi Kinerja Pelayanan kecamatan
			1.2. Mendorong desa/kelurahan untuk meningkatkan tertib administrasi desa/kelurahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1.2. Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi, Evaluasi Kinerja Pelayanan kelurahan/desa
			1.3. Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Korodinasi Kerjasama Daerah dalam penyelenggaraan kerjasama daerah	1.3. Fasilitasi, Bimtek, Sosialisasi, Supervisi, Evaluasi Kinerja Pelayanan kelurahan/desa
			1.4. Melaksanakan penataan produk hukum daerah	1.4. Peningkatan penyelarasan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
			1.5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui teknologi informasi	1.5. Sosialisasi ke masyarakat
		2. Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	2.1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan pemerintah kab/kota, provinsi, kementerian dan instansi pemerintah lainnya.	2.1. Koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah
			2.2. Monitoring pelaksanaan kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung	2.2. Monitoring dan Evaluasi
			2.3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan	2.3. Monitoring dan Evaluasi
			2.4. Meningkatkan transparansi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan maupun kinerja melalui kebijakan pemerintah daerah yang terkait	pelayanan bagi SKPD yang memanfaatkan ULP
			2.5. Meningkatkan pengendalian terhadap program-program yang telah direncanakan	2.5. Monitoring, Evaluasi
			2.6. Mengupayakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar-besarnya untuk pelayanan publik	2.6. Monitoring, Penyerapan Aspirasi ke Masyarakat
			2.7. Meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta	2.7. monitoring, fasilitasi

			2.8. Upaya peningkatan partisipasi sektor perbankan dalam memberikan dukungan kepada lembaga keuangan mikro	2.8. Monitoring, Fasilitasi
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung	3.1. Reformasi manajemen kinerja Birokrasi maupun PNS dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bekerjasama dengan instansi lain	3.1. Fasilitasi, Koordinasi
			3.2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penilaian kinerja	
			3.3. Memanfaatkan masyarakat sebagai stake holder pelayanan dalam menilai kinerja aparatur daerah	
			3.4. Menggunakan teknologi informasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan lembaga swasta untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik	3.4. penyusunan SOP SKPD, perangkat daerah yang efektif
			3.5. Meningkatkan pelayanan kepada tamu daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah dan juga apratur Setda	3.5. Pelayanan di kantor, rumah jabatan dan luar daerah, penerimaan tamu daerah, pemeliharaan aset sekretariat daerah

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Tahun 2018 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung merencanakan 10 (sepuluh) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang dirancang diarahkan untuk mencapai sasaran SKPD sehingga dapat menjawab isu strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan arah kebijakan yang difokuskan pada:

1. Peningkatan ketepatan waktu penyelesaian dokumen rencana pembangunan daerah melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Penyediaan data dan informasi yang valid dan terkini sebagai bahan evaluasi dan masukan penyusunan rencana pembangunan melalui Program Pengembangan Data/Informasi;
3. Peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui pelaksanaan Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peningkatan kualitas pengendalian rencana pembangunan daerah yang efektif dan terpadu melalui Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peningkatan konsistensi perencanaan perangkat daerah melalui pelaksanaan Program Perencanaan Sosial dan Budaya dan Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
6. Penyelenggaraan kelitbangan sesuai prioritas pembangunan daerah melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2020 kami tuangkan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam APBD  
Tahun 2020 dan Rencana Perubahan Tahun 2020

RENJA PERUBAHAN													
Kode	Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	DPA Tahun 2020			Renja Tahun 2020 Perubahan			Bertambah (Berkurang)	Catatan	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG					24.357.160.629,92			19.834.654.517,14	(4.522.506.112,78)			
4	01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					24.357.160.629,92			19.834.654.517,14	(4.522.506.112,78)		
4	01	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Setda Kabupaten Klungkung	13.00 point	5.551.853.806,44	Setda Kabupaten Klungkung	13.00 point	4.948.112.004,14	(603.741.802,30)	
4	01	09	01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 persen	4.910.143.634,00	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 persen	4.339.284.458,00	(570.859.176,00)	Pengurangan belanja ATK, Sesajen, Perangko, materai dan benda pos lainnya untuk refocusing anggaran. Penambahan anggaran jasa tenaga kerja kontrak administrasi karena pergeseran anggaran di Perubahan keempat dan kekurangan pembayaran BPJS
4	01	09	02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Bagian Umum Setda Kab.Klungkung	80.00 Persen	537.189.922,44	Bagian Umum Setda Kab.Klungkung	80.00 Persen	516.105.296,14	(21.084.626,30)	pengurangan belanja ATK, belanja penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat untuk refocusing anggaran Penambahan anggaran jasa tenaga kerja

													kontrak administrasi karena pergeseran anggaran di Perubahan ;keempat dan kekurangan pembayaran BPJS
4	01	09	03	Pengelolaan Kearsipan	Cakupan Surat-surat terdistribusi sesuai SOP	Setda Kab.Klungkung	100.00 persen	15.002.500,00	Setda Kab.Klungkung	100.00 persen	14.872.500,00	(130.000,00)	pengurangan belanja ATK untuk refocusing anggaran
4	01	09	04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD tersedia tepat waktu	Setda Kab.Klungkung	8.00 dokumen	16.911.150,00	Setda Kab.Klungkung	8.00 dokumen	16.235.150,00	(676.000,00)	pengurangan belanja penggandaan untuk refocusing anggaran
4	01	09	05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Setda Kab.Klungkung	12.00 laporan	7.788.000,00	Setda Kab.Klungkung	12.00 laporan	6.083.000,00	(1.705.000,00)	pengurangan belanja penggandaan untuk refocusing anggaran
4	01	09	06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan Terkirim Tepat Waktu	Setda Kab.Klungkung	12.00 laporan	64.818.600,00	Setda Kab.Klungkung	12.00 laporan	55.531.600,00	(9.287.000,00)	pengurangan belanja ATK, belanja cetak, dan belanja penggandaan untuk refocusing anggaran
4	01	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tingkat Kepuasan atas Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	10.340.881.587,00	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	10.595.645.203,00	254.763.616,00	
4	01	16	02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Cakupan Layanan Keprotokolan Sesuai SOP	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	754.165.184,00	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	271.090.498,00	(483.074.686,00)	- Pengurangan belanja ATK, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja jasa tenaga kerja non pegawai, belanja sewa pakaian adat/tradisional dan belanja perjalanan dinas karena recofucing anggaran
4	01	16	09	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan layanan pimpinan daerah	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 persen	2.330.288.744,00	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 persen	2.644.655.284,00	314.366.540,00	pengurangan belanja barang dan jasa untuk refocusing anggaran Penambahan anggaran jasa tenaga kerja kontrak administrasi karena pergeseran

													anggaran di Perubahan keempat dan kekurangan pembayaran BPJS
4	01	16	10	Dialog Interaktif	Cakupan Kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Yang Didokumentasikan	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	851.905.400,00	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	825.033.500,00	(26.871.900,00)	- Pengurangan belanja ATK, belanja materai, belanja BBM, belanja dokumentasi, belanja dekorasi, belanja publikasi, belanja penggandaan dan belanja pemeliharaan peralatan & mesin karena refocusing anggaran - Penambahan belanja pengadaan alat studio, pengad
4	01	16	11	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Disebarluaskan	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	3.013.893.816,00	Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	2.842.796.616,00	(171.097.200,00)	- Pengurangan belanja ATK, belanja penggandaan, belanja jasa tenaga kerja non pegawai dan belanja perjalanan dinas karena refocusing anggaran - Penambahan belanja publikasi media online nasional dan publikasi pada media bali post
4	01	16	12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Bulan Rumah Jabatan Dalam Kondisi Baik	Setda Kabupaten Klungkung	12.00 bulan	786.578.436,00	Setda Kabupaten Klungkung	12.00 bulan	829.210.256,00	42.631.820,00	pengurangan belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan serta belanja modal untuk refocusing anggaran
4	01	16	13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Prosentase Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 persen	767.037.024,00	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 persen	742.317.364,00	(24.719.660,00)	pengurangan belanja barang dan jasa untuk refocusing anggaran Penambahan anggaran jasa tenaga kerja kontrak administrasi

													karena pergeseran anggaran di Perubahan keempat dan kekurangan pembayaran BPJS
4	01	16	14	Kegiatan Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Daerah	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	1.837.012.983,00	Setda Kabupaten Klungkung	100.00 Persen	2.440.541.685,00	603.528.702,00	pengurangan belanja ATK,jasa kantor,dekorasi,publikasi dan SPPD untuk refocusing anggaran
4	01	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	Setda Kab. Klungkung	588.00 Peraturan	1.411.639.645,00	Setda Kab. Klungkung	588.00 Peraturan	833.667.062,00	(577.972.583,00)	
				Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM.		100.00 persen				100.00 persen			
4	01	26	01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah kebijakan bidang hukum dn ham yang ditetapkan	Setda Kab. Klungkung	1.00 kebijakan	527.424.835,00	Setda Kab. Klungkung	1.00 kebijakan	389.184.652,00	(138.240.183,00)	- Pengurangan Belanja Materai untuk refocusing anggaran - Pengurangan Honor TKBH refocusing anggaran - Penambahan Honor tenaga kontrak administrasi karena kekurangan anggaran di anggaran induk - Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman rapat karena refocu
				capaian RAD HAM.	100.00 Persen					100.00 Persen			
				Cakupan Perkara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang difasilitasi	100.00 persen					100.00 persen			
4	01	26	03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan produk hukum daerah tepat waktu	Setda Kab. Klungkung	588.00 produk hukum	562.440.490,00	Setda Kab. Klungkung	588.00 produk hukum	332.962.190,00	(229.478.300,00)	- Pengurangan honor panitia pelaksana kegiatan karena refocusing anggaran - Penambahan Honor tenaga kontrak administrasi karena kekurangan anggaran di anggaran induk - Penguradang belanja jasa tenaga ahli/instruktur -

													Pengurangan Belanja Cetak karena refo
4	01	26	05	Publikasi Peraturan Perundang- Undangan	Desa Binaan Sadar hukum	Setda Kab. Klungkung	8.00 Desa Binaan Sadar Hukum	321.774.320,00	Setda Kab. Klungkung	8.00 Desa Binaan Sadar Hukum	111.520.220,00	(210.254.100,00)	- Pengurangan Belanja Pejati karena refocusing anggaran - Penambahan Honor tenaga kontrak administrasi karena kekurangan anggaran di anggaran induk - pengurangan Belanja Jasa pembinaan dan penelitian awig karena refocusing anggaran - Pengurangan Belanja h
				Rekomendasi terhadap Awig -awig Desa pakraman yang dikukuhkan Bupati		2.00 Desa Pakraman	2.00 Desa Pakraman						
				Jumlah Dokumen hukum yang dipublikasikan		30.00 Dokumen	30.00 Dokumen						
4	01	33		Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan	Kabupaten Klungkung	100.00	789.163.854,72	Kabupaten Klungkung	100.00	234.933.552,00	(554.230.302,72)	
4	01	33	04	Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	LPPD dan ILPPD Terkirim Tepat Waktu	Kabupaten Klungkung	2.00 Laporan	50.870.000,00	Kabupaten Klungkung	2.00 Laporan	37.488.352,00	(13.381.648,00)	pengurangan anggaran
4	01	33	11	Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang Ditindaklanjuti	Kabupaten KLungkung	4.00 Rekomendasi	49.125.000,00	Kabupaten KLungkung	0.00 Rekomendasi	0,00	(49.125.000,00)	Pengurangan anggaran
4	01	33	14	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti	Kabupaten Klungkung	4.00 Rekomendasi	444.653.854,72	Kabupaten Klungkung	3.00 Rekomendasi	140.702.200,00	(303.951.654,72)	Penambahan anggaran
4	01	33	15	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kerjasama Daerah	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	114.744.000,00	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	53.218.000,00	(61.526.000,00)	Penambahan anggaran

4	01	33	17	Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan atau Desa	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	Kabupaten Klungkung	4.00 Rekomendasi	50.323.000,00	Kabupaten Klungkung	0.00 Rekomendasi	0,00	(50.323.000,00)	Pengurangan anggaran
4	01	33	18	Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	Kabupaten Klungkung	6.00 Kebijakan	79.448.000,00	Kabupaten Klungkung	6.00 Kebijakan	3.525.000,00	(75.923.000,00)	Penambahan anggaran
4	01	47		Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	569.128.464,00	Kabupaten Klungkung	100.00 persen	96.943.704,00	(472.184.760,00)	
4	01	47	01	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah kebijakan pengendalian inflasi daerah	Kabupaten Klungkung	1.00 kebijakan	221.009.152,00	Kabupaten Klungkung	1.00 kebijakan	48.500.252,00	(172.508.900,00)	- Pengurangan belanja : Alat tulis kantor, cetak dan penggunaan, sewa sarana mobiltas, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman dan perjalanan dinas. untuk refocusing anggara - Penambahan belanja jasa kantor karena kekurangan p
4	01	47	05	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UMKM	Jumlah kebijakan bidang UMKM yang ditetapkan	Kabupaten Klungkung	1.00 kebijakan	83.478.960,00	Kabupaten Klungkung	1.00 kebijakan	10.726.000,00	(72.752.960,00)	- Pengurangan belanja : Alat tulis kantor, cetak dan penggunaan, belanja makanan dan minuman dan perjalanan dinas. untuk refocusing anggara
4	01	47	06	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD	Jumlah kebijakan terkait BUMD dan BLUD	Setda Kab. klungkung	2.00 Kebijakan	61.558.000,00	Setda Kab. klungkung	1.00 Kebijakan	3.068.000,00	(58.490.000,00)	- Pengurangan belanja : Alat tulis kantor, cetak dan penggunaan, belanja makanan dan

													minuman dan perjalanan dinas. untuk refocusing anggaran
4	01	47	07	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Alam	jumlah kebijakan bidang sumber daya alam	Setda Kab. Klungkung	1.00 kebijakan	134.552.852,00	Setda Kab. Klungkung	1.00 kebijakan	30.257.952,00	(104.294.900,00)	- Pengurangan belanja : Alat tulis kantor, cetak dan pengandaan, belanja makanan dan minuman dan perjalanan dinas. untuk refocusing anggaran - Penambahan belanja jasa kantor karena kekurangan pada anggaran induk
4	01	47	08	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perijinan, Investasi dan Penyertaan Modal	Jumlah kebijakan bidang perijinan, investasi dan penyertaan modal	Setda Kab. Klungkung	6.00 kebijakan	68.529.500,00	Setda Kab. Klungkung	3.00 kebijakan	4.391.500,00	(64.138.000,00)	- Pengurangan belanja : Alat tulis kantor, cetak dan pengandaan, belanja makanan dan minuman dan perjalanan dinas. untuk refocusing anggaran
4	01	56		Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	Bag. Adm. PBJ	3.25 indeks	629.020.396,00	Bag. Adm. PBJ	3.25 indeks	377.683.006,00	(251.337.390,00)	
4	01	56	01	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Cakupan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diselesaikan	Bag. Adm. PBJ	100.00 persen	377.327.132,00	Bag. Adm. PBJ	100.00 persen	239.651.502,00	(137.675.630,00)	Pengurangan honor pegawai, belanja materai, belanja pengandaan, belanja makanan dan minuman dan belanja perjalanan dinas untuk refocusing anggaran. Penambahan anggaran jasa tenaga kerja kontrak administrasi karena pergeseran anggaran di Perubahan keempat



					Tersedia Tepat Waktu									
					Perbup Kelas Jabatan Tersedia Tepat Waktu		1.00 Dokumen			1.00 Dokumen				
4	01	58	03	Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah	SK Kepala Daerah tentang SOP Tersedia Tepat Waktu	Bagian Organisasi	1.00 Dokumen	173.181.500,00	Bagian Organisasi	30.00 Dokumen	0	16.291.450,0	(156.890.050,00)	Terdapat SPJ Keuangan yang harus dicetak dengan kertas
					Inovasi Pelayanan Publik Terkirim Tepat Waktu ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik		8.00 Aksi			8.00 Inovasi				
4	01	63		Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra	100.00 %	3.531.147.588,76	Bagian Kesra	100.00 %		2.170.199.904,00	(1.360.947.684,76)	
4	01	63	01	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kebijakan Bidang Agama Pendidikan dan Kebudayaan Yang Ditetapkan	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan	3.460.763.956,76	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan		2.139.922.152,00	(1.320.841.804,76)	- Pengurangan Honor Panitia Aci Bhakti Pengantar karena refocusing anggaran - Penambahan anggaran tenaga administrasi (Tenaga Kontrak) karena kekurangan anggaran di anggaran Induk - Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena refocusing anggaran
4	01	63	02	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata Yang Ditetapkan	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan	23.229.500,00	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan		8.739.000,00	(14.490.500,00)	- Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena refocusing anggaran - Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas karena refocusing anggaran

4	01	63	03	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Ditetapkan	Bagian Kesra	2.00 Kebijakan	47.154.132,00	Bagian Kesra	2.00 Kebijakan	21.538.752,00	(25.615.380,00)	- Penambahan anggaran tenaga administrasi (Tenaga Kontrak) karena kekurangan anggaran di anggaran Induk - Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena refocusing anggaran - Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas karena Refocusing anggaran
4	01	80		Program Pengembangan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat	Bag. ADM Pembangunan	100.00 persen	608.127.724,00	Bag. ADM Pembangunan	100.00 persen	167.627.114,00	(440.500.610,00)	
4	01	80	01	Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Cakupan Program Pembangunan Daerah	Bag. ADM Pembangunan	100.00 persen	205.346.050,00	Bag. ADM Pembangunan	100.00 persen	10.133.000,00	(195.213.050,00)	refocusing anggaran
4	01	80	02	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pengendalian	Bag. ADM Pembangunan	100.00 persen	195.628.250,00	Bag. ADM Pembangunan	100.00 persen	15.054.350,00	(180.573.900,00)	refocusing anggaran
4	01	80	03	Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Evaluasi	Bag. ADM Pembangunan	100.00 persen	207.153.424,00	Bag. ADM Pembangunan	100.00 persen	142.439.764,00	(64.713.660,00)	refocusing anggaran
<b>TOTAL</b>								<b>24.357.160.629,92</b>			<b>19.834.654.517,14</b>	<b>(4.522.506.112,78)</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2020 berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2020 dan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga triwulan II tahun anggaran 2020, serta memuat permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam hal adanya kebijakan terkait kondisi keuangan daerah yang akan mempengaruhi pelaksanaan Perubahan Renja ini maka optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja ini melalui perubahan strategi pelaksanaan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 ini.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Semarapura, 28 September 2018

Kepala Baperlitbang Kabupaten Klungkung,



  
I Wayan Wasta, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19601231 198603 1 345